

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENTANG
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

OLEH:

HELVITRA ASWITA PURBA

188510017



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENTANG
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
DI KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

HELVITRA ASWITA PURBA

188510017



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/12/22



SURAT PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26/09/2022


Helvitra Aswita Purba

188510010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

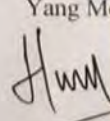
Nama : Helvitra Aswita Purba
Npm : 188510071
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tentang Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) DI Kabupaten Simalungun.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : _____ 2022
Yang Menerima



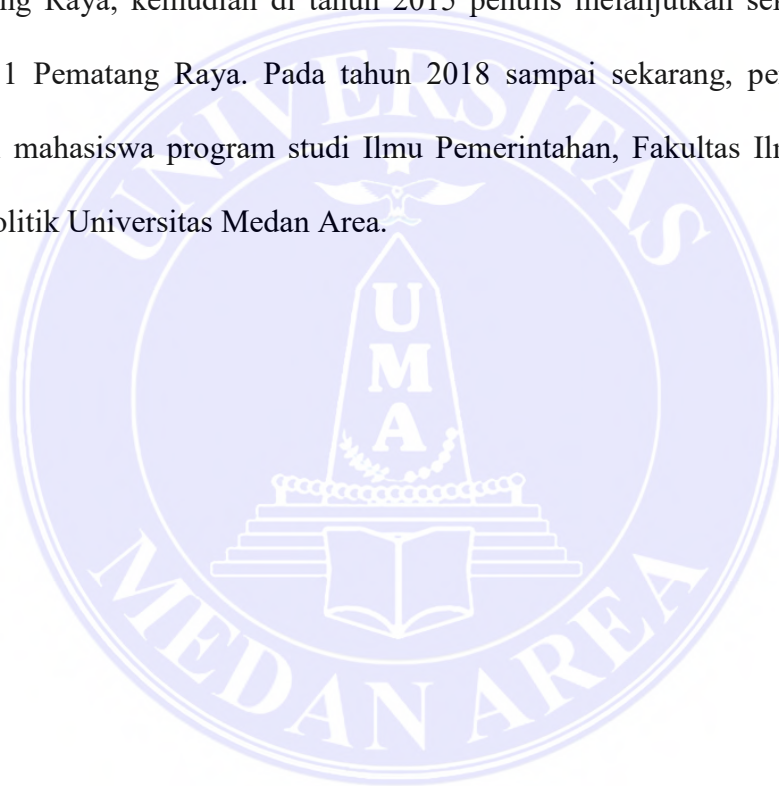
Helvitra Aswita Purba
188510017



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Helvitra Aswita Purba, anak dari Lepson Purba dan Riada Zamasi. Lahir di Rindung 06 agustus 1999. Penulis merupakan anak ke 2 (Dua) dari 3 (Tiga) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 0911337 Rindung pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pematang Raya, kemudian di tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di SMA GKPS 1 Pematang Raya. Pada tahun 2018 sampai sekarang, penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tentang Program Kartu Indonesia Pintar Di Kabupaten Simalungun. Fenomena yang terjadi di kabupaten simalungun dalam implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar ini masih ada siswa yang berasal dari keluarga mampu secara materi terdaftar sebagai penerima kartu indonesia pintar serta masih ada juga siswa yang tergolong tidak mampu secara materi tidak terdaftar sebagai penerima dana kartu indonesia pintar atau tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan dinas sosial dalam program kartu indonesia pintar di kabupaten simalungun dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan dinas sosial dalam program kartu indonesia pintar di kabupaten simalungun. Penulis mengambil teori menurut George Edward III terdapat empat (4) faktor : Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dinas sosial tentang program kartu indonesia pintar di kabupaten simalungun belum cukup efektif. Hal ini dilihat dari empat indikator antara lain komunikasi, sumber daya, diposisi, struktur birokrasi. Hambatan dinas sosial dalam penanganan program kartu indonesia pintar dikabupaten simalungun kurangnya sumber daya serta sarana dan prasarana.

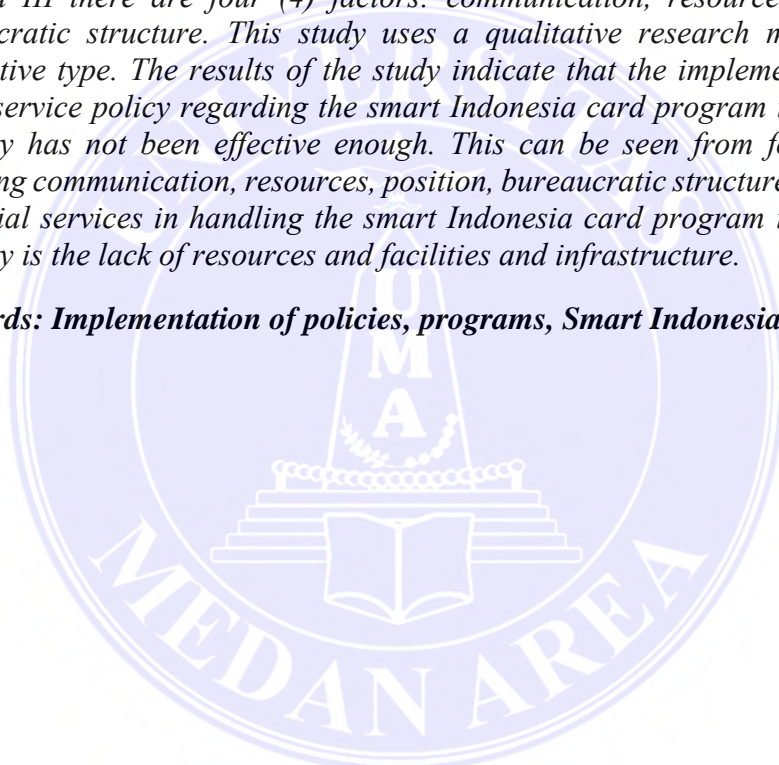
Kata kunci : Implementasi kebijakan, program, Kartu Indonesia Pintar



ABSTRACT

This study examines the implementation of the Social Service Policy regarding the Smart Indonesia Card Program in Simalungun Regency. The phenomenon that occurs in Simalungun Regency in the implementation of the Smart Indonesia Card program policy is that there are still students who come from financially capable families who are registered as recipients of the Smart Indonesia Card and there are also students who are classified as materially incapable of being not registered as recipients of Smart Indonesia Card funds or not on target. The purpose of this study was to determine the implementation of social service policies in the smart Indonesia card program in Simalungun Regency and to determine the inhibiting factors for implementing social service policies in the Smart Indonesia Card program in Simalungun Regency. The author takes the theory according to George Edward III there are four (4) factors: communication, resources, disposition, bureaucratic structure. This study uses a qualitative research method with a descriptive type. The results of the study indicate that the implementation of the social service policy regarding the smart Indonesia card program in Simalungun Regency has not been effective enough. This can be seen from four indicators including communication, resources, position, bureaucratic structure. The obstacle for social services in handling the smart Indonesia card program in Simalungun Regency is the lack of resources and facilities and infrastructure.

Keywords: *Implementation of policies, programs, Smart Indonesia Card*



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha esa yang telah memebrikan segala berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tentang Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kabupaten Simalungun”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata satu (SI) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penulisan Skripsi ini, dengan segala kemampuan yang ada, masih banyak terdapat kekurangan dan mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun maupun mengarah kepada penyempurnaan Skripsi ini. Sehingga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Penelis skripsi ini tidak terlepas dari dukungan doa dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih dengan segala ketulusan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orantua peneliti yaitu ayahanda tercinta Lepson Purba dan ibunda tercinta Riada Zamasi serta keluarga yang telah memeberikan doa, bimbingan, dorongan serta semangat. Dan tak lupa juga kepada pihak yang terlibat dan turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan,
M.Eng,Sc

2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Ipol, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing I (pertama) yang telah banyak meluangkan waktu pikiran dan tenaga dalam memberikan bimbingan maupun saran kepada penulis.
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku pembimbing II (kedua) yang telah memberikan banyak saran sehingga penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dan memberikan pengetahuan kepada penulis dalam skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen beserta staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi selama perkuliahan kepada penulis.
8. Bapak Sakban Saragih, SP, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Bapak Andar Abdi Saragih, SP, M.Si, selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Bapak Ando Saragih, S.Sos, selaku Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Simalungun dan masyarakat Kabupaten Simalungun yang telah membantu dan memberikan informasi selama pelaksanaan penelitian dilakukan.

9. Teruntuk seseorang yang terbaik Wesly Arwendow Samosir terimakasih telah menemani penulis dari awal mulai skripsi dari mulai membuat judul yang sabar memberikan dukungan dan motivasi hingga saat ini.
10. Dengan segala kerendahan hati ucapan terimakasih ini kupersembahkan kepada keluarga besar Purba tambak, Kepada saudara penulis Kakak tercinta Mardiana Friska Purba, Adik tersayang Jeki Riwanda Purba yang selalu setia memberikan motivasi dukungan dan doa hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa stambuk 2018 program Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah saling membantu dan memberikan dorongan moral dalam penulisan skripsi ini.

Atas bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus sebesar-besarnya. Semoga Tuhan melimpahkan berkahnya serta membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Dengan ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Oktober 2022

Helvitra Aswita Purba

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Implementasi.....	9
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.1.2 Model Implementasi	12
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	13
2.2 Kebijakan	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan.....	15
2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan.....	18
2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan	20
2.2.4 Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan	22
2.3 KARTU INDONESIA PINTAR (KIP).....	25

2.3.1	Pengerti Kartu Indonesia Pintar (KIP)	25
2.3.2	Tujuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)	26
2.3.3	Sasaran Kartu Indonesia Pintar	27
2.3.4	Pemanfaatan Dana Kartu Indonesia Pintar	28
2.3.5	Mekanisme pengambilan dana KIP	28
2.4	STUDI RELEVAN	30
2.5	KERANGKA BERPIKIR	33
BAB III		35
METODE PENELITIAN		35
3.1	Jenis Dan Tipe Penelitian	35
3.2	Lokasi Dan Waktu Penelitian	37
3.3	Informan Penelitian	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data	40
3.5	Teknik Analisis Data	41
BAB IV		44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44
4.1	Hasil Penelitian	44
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten simalungun	46
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun	46
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Simalungun	47
4.2	Pembahasan	50
4.2.1	Komunikasi	55
4.2.2	Sumber Daya	58
4.2.3	Disposisi	60
4.2.4	Struktur Birokrasi	64
4.3	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar	68
BAB V		72
PENUTUP		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		75

LAMPIRAN.....	77
Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	77
Lampiran 2 : Data Informan	87
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara	90



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kabupaten Simalungun.....	45
---	----



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian.....	34
Bagan 4.1: Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.....	46
Bagan 4.2: SOP Kartu Indonesia Pintar.....	64



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.4 : Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian.....	38
Tabel 4.2.1 : Daftar nama penerima Kartu Indonesia Pintar dari SD.....	52
Tabel 4.2.1 : Daftar nama penerima Kartu Indonesia Pintar dari SMP.....	53
Tabel 4.2.1 : Daftar nama penerima Kartu Indonesia Pintar dari SMA.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat dengan baik, namun tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan negara karena tidak dilaksanakan dengan baik. Istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi juga merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Menginterpretasikan dan menetapkan suatu kebijakan sebelum diimplementasikan ialah langkah awal yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan suatu capaian seperti program yang telah dipilah sedemikian rupa sebelum adanya penetapan. Melakukan interpretasi tersebut berkenaan dengan mendefinisikan atau mengatur metode-metode untuk melaksanakan program. Program yang memberi peluang kepada pemerintah yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah memiliki banyak bentuk dan macam, salah satunya terkait kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembuatan ataupun pengimplementasian perlu dilandasi oleh kebijakan yang pro atau sesuai bukan hanya untuk satu daerah namun untuk daerah-daerah lainnya yang sesuai sehingga tidak terjadi kesenjangan akan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perspektif atau sudut pandang dalam proses implementasi kebijakan atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan perilaku birokrat dalam pemberian layanan atau jasa tertentu kepada masyarakat dan mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Maka dari itu dalam implementasi suatu program khususnya yang melibatkan organisasi/instansi pemerintah maka fokus analisa implementasi kebijakan akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapat keputusan serta dalam upaya memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Pembangunan dalam suatu daerah khususnya terkait kesejahteraan yang menjadi titik fokus pemerintah yaitu pemenuhan kewajiban dasar yaitu salah satunya pembangunan pendidikan. Hal ini dikarenakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ditunjang dengan peningkatan taraf pendidikan. Pendidikan yang merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan. Selain itu, pendidikan merupakan instrument yang sangat menentukan dalam memberikan kontribusi kemajuan suatu bangsa dalam membangun watak bangsa. Dalam perencanaan pembangunan ini perlu didukung oleh suatu kebijakan publik yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Proses menelaah suatu kebijakan publik yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat luas akan menjadi gambaran awal dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Bukan hanya itu, mengevaluasi kebijakan publik dapat dibuat pada saat merumuskan kebijakan, artinya sebelum diimplementasikan dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan tentang pendidikan di Indonesia yang berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 yang mengamatkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu kebijakan yang sudah di implementasikan yaitu pendidikan gratis yang bertujuan agar tidak adanya anak yang berusia pendidikan dasar dan menengah yang tidak menikmati pendidikan, sesuai dengan program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan, maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berbagai tingkat taraf hidup dan penggolongan sosial untuk menikmati pendidikan.

Mengenai suatu kebijakan yang bersifat pembangunan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan yang dilandasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 (2012), menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terkait dengan visi pemerintah dan rencana kerja pemerintah yang disebutkan diatas dan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu; Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk penerima Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk penerima Program Indonesia Sehat. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa salah satu program atau kebijakan pemerintah yaitu penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pembangunan pendidikan yang berkualitas berperan penting untuk melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Dalam tahun 2015, upaya meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas antara lain akan dilaksanakan melalui wajib belajar 12 tahun, yaitu untuk memenuhi hak seluruh penduduk terhadap pelayanan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas. Namun, pada kebijakan yang sudah memihak kepada kesejahteraan masyarakat belum dapat dikatakan dapat mengurangi beban masyarakat dalam dunia pendidikan dikarenakan implementasi dari suatu kebijakan juga menjadi hal penting sebagai faktor keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Kesempatan warga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata. Hadi Supeno (2010) menyatakan bahwa pendidikan yang dulunya begitu mulia, yaitu melepaskan rakyat dari kemelaratan, sekarang telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanya

menjadi milik mereka orang-orang yang mempunyai banyak uang dan mereka yang berasal dari keluarga menengah dan atas. Pendidikan telah menjadi barang mewah, dengan harga yang begitu mahal. Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji dalam kehidupan sehari – hari hanyalah sebuah cita – cita yang kita tidak tahu sampai kapan akan merata pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin. Muhammad Saroni (2013) menyebutkan bahwa para pejabat politik di tingkat pusat maupun daerah masih berfokus pada kepentingan mereka sendiri sehingga kepentingan masyarakat miskin hanya menjadi amanat tugas mereka tidak di laksanakan dengan baik. Sehingga masyarakat yang kurang mampu terpaksa harus berjuang sendiri berhadapan dengan kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di depan mereka. Masalah pembiayaan selalu menjadi masalah bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah kebawah. Masyarakat kelompok lapisan ini harus rela menjadi penonton di pinggir lapangan pendidikan sebab tidak mampu membeli karcis untuk duduk di kursi penonton yang nyaman. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi. Banyaknya siswa yang berhenti bersekolah dengan alasan tidak mempunyai biaya dan lebih memilih untuk bekerja membuat angka putus sekolah semakin meningkat.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Simalungun adalah masih ada siswa yang berasal dari keluarga mampu secara materi terdaftar sebagai penerima KIP serta masih ada juga siswa yang tergolong tidak mampu secara materi tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP, penerimaan dananya tidak tepat pada waktunya. Padahal pemerintahan mengeluarkan program ini adalah untuk siswa/masyarakat

yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi bantuan dana KIP adalah untuk membeli buku dan alat sekolah, pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, biaya kursus/les tambahan dan keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah. Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung di terima di bank, yang mengelola orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut.

Kabupaten simalungun merupakan salah satu yang menerima bantuan dana KIP. Kabupaten simalungun yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang terdiri dari SD, SMP dan SMA, Masing – masing menerima bantuan dana KIP sebesar Rp. 1.000.000,00 pertahun untuk SMA, Rp. 750.000,00 pertahun, untuk SMP dan Rp. 450.000,00 untuk SD, dana tersebut diberikan pertahun (per dua semester). Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera yang dikirim dari pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar ini (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional.

Begitu juga pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar yang dilakukan Di kabupaten Simalungun. sejak diterbitkannya Program tersebut pemerintah kabuapten simalungun telah memberikan kartu KIP tersebut kepada masyarakatnya. Masyarakat atau warga yang menerima kartu Indonesia pintar ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu, dari kelompok SD,SMP dan SMA. Dari SD menerima sebanyak 28 orang, dari SMP menerima sebanyak 27 orang, dari SMA menerima sebanyak 30 orang.

Namun ada indikasi dan keluhan masyarakat Kabupaten Simalungun terhadap program kartu Indonesia pintar yang terkesan tidak tepat sasaran, seperti anak yang tidak lagi sekolah mendapatkan kartu tersebut dan juga yang mendapatkan kartu Indonesia pintar tersebut berasal dari keluarga yang mampu, dan pemanfaatan kartu Indonesia pintar tersebut sering tidak tepat sasaran.

Bersumber pada fenomena diatas penulis tertarik mau melaksanakan riset menimpa penerapan kebijakan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Simalungun dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL TENTANG PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI KABUPATEN SIMALUNGUN”**

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang diatas, yang jadi rumusan permasalahan dalam riset ini merupakan:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Dinas Sosial tentang program Kartu Indonesia Pintar(KIP) di Kabupaten Simalungun?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan permasalahan diatas, yang jadi tujuan dalam riset ini yakni:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Kartu Indoneisa Pintar di kabupaten simalungun.

- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di kabupaten simalungun

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan program studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, bahwa dengan hasil penelitian ini masyarakat lebih mengerti tentang Kartu Indonesia pintar.
- b. Bagi pemerintah daerah, bahwa hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Simalungun dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut keberlangsungan program KIP ke depannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2000) dalam (Wahab(2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh pihak–pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita–cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program

yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar (2001) dalam (Wahab (2001:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, (2002) dalam (Harsono (2002:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program. Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (2004) dalam (Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.

Adapun Schubert (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.2 Model Implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

George Edward (2011) dalam (Widodo (2011:96–110) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Senis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
 - b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
 - c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan public direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal:

- 1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
- 2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dan rencana pelaksanaan kerja, kepemimpinan dan peran kegiatan. Istilah ini dapat diterapkan pada organisasi pemerintah dan kelompok swasta daerah, serta pembuat kebijakan yang

bertentangan dengan peraturan dan undang-undang. Jika undang-undang dapat memaksakan atau melarang suatu sikap, kebijakan itu hanya pedoman untuk bertindak, dan kemungkinan besar akan merugikan. mendapatkan hasil yang diharapkan.

Tinjauan kebijakan atau kebijakan juga dapat merujuk pada proses pengambilan keputusan organisasi, termasuk menentukan berbagai alternatif, seperti rencana atau prioritas pengeluaran, dan membuat pilihan berdasarkan konsekuensinya. Kebijakan juga dapat disebut sebagai mekanisme politik, manajerial, keuangan atau administratif untuk mencapai tujuan yang jelas.

Kebijakan adalah sesuatu yang dikatakan atau tertulis yang memberikan gambaran umum tentang penetapan ruang lingkup, yang memberikan batasan dan arah umum bagi seseorang. Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata (*policy*). Kebijakan juga bisa disebut rangkaian konsep dan prinsip, yang membentuk ruang lingkup kerja, kepemimpinan, dan perilaku. Kebijakan dapat dibuat dengan keputusan yang dipertimbangkan secara hati-hati oleh pembuat keputusan tingkat tinggi, daripada aktivitas rutin dan terencana yang tak terhitung jumlahnya atau keputusan yang terkait dengan aturan pengambilan keputusan.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Tetapi Amara Raksataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan ialah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen yaitu :

1. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa padoman antara lain:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2010 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2009: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E. Anderson sebagaimana dikutip Irfan Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*)

dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan

Tahap- tahap pembuatan kebijakan publik bagi William N. Dunn,(2003) merupakan selaku berikut:

1. Penataan Agenda

Penataan jadwal merupakan suatu fase serta proses yang sangat strategis dalam kenyataan kebijakan publik. Dalam proses inilah terdapat ruang buat memaknai apa yang diucap selaku permasalahan publik serta prioritas dalam jadwal publik dipertarungkan. Bila suatu isu sukses mendapatkanstatus selaku permasalahan publik, serta memperoleh prioritas dalam jadwal publik, hingga isu

tersebut berhak memperoleh alokasi sumber energi publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penataan jadwal pula sangat berarti buat memastikan sesuatu isu publik yang hendak dinaikan dalam sesuatu jadwal pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) kerap diucap pula selaku permasalahan kebijakan (*policy problem*). Policy issues umumnya timbul sebab sudah terjalin silang komentar di antara para aktor menimpa arah aksi yang sudah ataupun hendak ditempuh, ataupun pertentangan pemikiran menimpa kepribadian kasus tersebut. Bagi William N. Dunn(2003), isu kebijakan ialah produk ataupun guna dari terdapatnya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, uraian ataupun evaluasi atas sesuatu permasalahan tertentu. Tetapi tidak seluruh isu dapat masuk jadi sesuatu jadwal kebijakan.

2. Formulasi Kebijakan

Permasalahan yang telah masuk dalam jadwal kebijakan setelah itu dibahas oleh para pembentuk kebijakan. Masalah- masalah tadi didefinisikan buat setelah itu di cari pemecahan permasalahan yang terbaik. Pemecahan permasalahan tersebut berasal dari bermacam alternatif ataupun opsi kebijakan yang terdapat. Sama halnya dengan perjuangan sesuatu permasalahan buat masuk dalam jadwal kebijakan, dalam sesi formulasi kebijakan tiap- tiap alternatif bersaing buat bisa di seleksi selaku kebijakan yang di ambil buat memecahkan permasalahan.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi merupakan buat membagikan otorisasi pada proses bawah pemerintahan. Bila aksi legitimasi dalam sesuatu warga diatur oleh kedaulatan rakyat, masyarakat negeri hendak menjajaki arahan pemerintah. Tetapi masyarakat negeri wajib yakin kalau aksi pemerintah yang legal wajib didukung. Legitimasi

bisa dikelola lewat manipulasi simbol- simbol tertentu, dimana lewat proses ini, masyarakat negeri belajar buat menunjang pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang sudah diambil, dilaksanakan oleh unit- unit administrasi yang memobilisasi sumber energi finansial serta manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Penilaian kebijakan bisa dikatakan selaku aktivitas yang menyangkut ditaksir ataupun evaluasi kebijakan yang mencakup substansi, implementasi serta akibat. Dalam perihal ini, penilaian ditatap selaku sesuatu aktivitas fungsional. Maksudnya, penilaian kebijakan tidak cuma dicoba pada sesi akhir saja, melainkan dicoba dalam segala proses kebijakan. Dengan demikian, penilaian kebijakan dapat meliputi sesi formulasi masalah- masalah kebijakan, program- program yang diusulkan buat menuntaskan permasalahan kebijakan, implementasi, ataupun sesi akibat kebijakan.

2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Menurut Suharno (2010: 52-53) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan

selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini merupakan bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno, 2010: 52-53).

2.2.4 Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarmo (2002) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan jika di pandang dalam pengertian luas adalah alat administrasi hukum di mana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan.

Implementasi merupakan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundang – undangan di tetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk output yang jelas. Tugas implementasi yaitu sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan – tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari aktivitas pemerintah. Di samping itu implementasi juga menyangkut masalah pencipta suatu policy delivery system atau sistem penghantaran atau penyerahan kebijakan. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya di sampaikan dalam bentuk peraturan perundang – undangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak di atasi, tujuan yang hendak di capai serta cara untuk memecahkannya Effend Sofian (2001).

Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan keputusan kebijakan. Implementasi juga adalah semua tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu Arif Rohman (2009). Dimana pelaksanaan implementasi ini dibentuk melalui pengorganisasian sehingga membentuk suatu tugas-tugas yang berbeda antar personel untuk menghasilkan kebijakan yang direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Selanjutnya Cleaves yang di kutip dalam wahab (2008) implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”.

Syaukani dkk (2004) Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang

terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan public dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2005), makna implementasi dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan telah berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang muncul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikan maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik dilaksanakan oleh badan pemerintah yang melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group) maupun memberikan pelayanan. Untuk kebijakan sederhana, dalam implementasi hanya satu badan yang dilibatkan yaitu berfungsi sebagai pelaksana.

Implementasi kebijakan akan menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor tersebut adalah semua aspek yang sangat berpengaruh, dan karenanya menentukan kinerja implementasi yang perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri Nugroho (2003). Suatu pelaksanaan sangat penting dalam suatu pemerintahan dan mekanisme operasional kebijakan tidak hanya berkaitan dengan prosedur-prosedur teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan masalah - masalah politik seperti konflik keputusan, dan tanggapan kelompok sasaran Abidin (2002).

Syukur dalam Surmayadi (2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: adanya program atau kebijakan yang di laksanakan, target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan di tetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan dan untur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Perbuatan atau tindakan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila perbuatan atau perilaku mereka tidak sesuai dengan kehendak pemerintah atau negara maka kebijakan public tersebut tidak dapat disebut efektif Sutarto (2006).

2.3 KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Rini Septiani Astuti (2016) Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab sekolah.

2.3.1 PENGERTIAN KARTU INDONEISA PINTAR (KIP)

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemeberian bantuan tunai kepada siswa dalam usia (6-21 Tahun) yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang mempunyai kriteria yang telah ditetapkan dari pemerintah Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang kemudian disebut PIP adalah pemberian bantuan dana yang berupa uang tunai dari pemerintah yang diperuntukkan kepada siswa yang orang tuanya dari keluarga yang kurang mampu dalam masalah pembiayaan pendidikannya. Program Indonesia Pintar, yang lalu disebut KIP merupakan kartu yang di berikan untuk anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi, direktorat jendral terkait, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasar dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

2.3.2 Tujuan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar merupakan satu dari beberapa program nasional yang mempunyai tujuan untuk:

- a. Meningkatkan angka partisipasi baik pendidikan dasar maupun menengah

- b. Meningkatkan pendidikan yang dilihat dengan penurunan angka siswa yang putus sekolah dan angka melanjutkan.
- c. Menurunnya partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat, Antara masyarakat kaya dan miskin, antara laki – laki dan perempuan, antara wilayah di kota dan di desa maupun antar daerah lainnya.
- d. Meningkatkan kesiapan siswa dari pendidikan menengah untuk bekerja atau lanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi.

2.3.3 Sasaran Kartu Indonesia Pintar

Penerima Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan pada anak yang berusia 6 samapai 21 tahun. Persyaratan penerima KIP adalah anak usia 6 sampai 21 tahun yang merupakan :

- a. Masyarakat yang menerima BSM 2014 dan mempunyai KPS
- b. Siswa dari keluarga yang mempunyai KPS/KKS/KIP belum menerima BSM 2014
- c. Siswa yang berasal dari keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS
- d. Siswa dengan status yatim piatu/yatim/piatu dan dari panti asuhan
- e. Siswa yang sedang terkena bencana alam
- f. Anak usia 6 sampai 21 tahun yang tidak sekolah (*Drop Out*) yang ingin kembali untuk bersekolah
- g. Siswa atau anak dari keluarga miskin yang terancam tiak dapat melanjutkan sekolah atau siswa dengan bebrapa pertimbangan khusus yang lain, misalnya: terdapat kelainan fisik, di daerah konflik, terkena musibah, orang tuanya di PHK, dari keluarga terpidana berada di dalam LAPAS,

mempunyai saudara lebih dari 3 orang yang tinggal serumah, siswa SMK yang melanjutkan studi keahlian dalam bidang; pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pelayaran atau kemaritiman, siswa yang kursus maupun satuan pendidikan nonformal lainnya. Kecuali sasaran yang terdaftar pada SMK bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan pelayaran/kemaritiman, sasaran nomor 1 dan nomor 2 merupakan sasaran yang di prioritaskan.

2.3.4 Pemanfaatan Dana Kartu Indonesia Pintar

Program KIP diberikan berupa biaya pribadi siswa sehingga dapat melanjutkan pendidikannya hingga selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan tersebut di tujukan secara langsung kepada siswa agar bermanfaat sebagai berikut:

- a. membeli buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- c. Transportasi siswa ke sekolah
- d. Uang jajan siswa di sekolah
- e. Biaya kursus atau les tambahan

2.3.5 Mekanisme pengambilan dana KIP

Pengambilan atau pencairan dana KIP dilakukan oleh peserta didik untuk SD, SMP, SMA yang belum mempunyai KTP, mekanisme dalam pengambilan dana siswa diharuskan memiliki pendamping minimal satu orang guru/orang tua/wali dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar (SD)

- 1) Surat keterangan kepala sekolah
 - 2) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata , lengkap dengan nama sekolah dan NISN
 - 3) KTP orang tua/wali
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 1) Surat keterangan kepala sekolah
 - 2) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata, lengkap dengan nama sekolah dan NISN
 - 3) KTP orang tua/wali
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 1) Surat keterangan Kepala Sekolah
 - 2) Kartu pelajar atau identitas pribadi.
 - 3) KTP/Kartu Keluarga orang tua/wali bagi peserta didik yang belum mempunyai KTP.
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 1) Surat keterangan Kepala Sekolah
 - 2) Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap
 - 3) KTP peserta didik atau KTP orang tua/wali bagi siswa yang belum memiliki KTP.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan digunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama pada penelitian ini. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

No	NAMA	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	Sri Esnawati pada tahun 2014	Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Mendeskripsikan pelaksanaan KIP di sekolah, penelitian ini berfokus pada proses dan mekanisme KIP dalam pemerataan pendidikan.	Perbedaan penelitian nya adalah tempat penelitian dan mekanisme pengusulan untuk mendapatkan bantuan untuk siswa kurang mampu yang dimulai dari siswa menyerahkan kartu BSM ke guru BK.

2	Ghafuur Kharisma Ramadhan pada tahun 2014	Implementasi Program Bnatuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) di Kabupaten Sambas.	Menunjukkan bahwa faktor- faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi,dan struktur birokrasi memag sangat memepengaruhi efektifitas implementasi program BSM.	Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan penelitian ini berfokus kepada BSM SD dan hanya untuk Sekolah Dasar dan penelitian ini hanya berfokus di sekolah saja.
3	Rini Septiani Astuti (2016)	Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di SMP N 1 Semin.	Dalam penelitian ini merujuk pada peran pemerintah atau dinas kota atau yang memiliki peran utama dalam penyaluran KIP.	Perbedaan nya adalah tempat penelitian dan penelitian ini hanya berfokus di sekolah menengah pertama.

4	Triana Desita Sari (2017)	Mengenai Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indoensia Pintar (KIP) Di Lampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bnadar Lampung.	Hasil atau manfaat dari sebuah kebijakan khususnya Program Kartu Indonesia Pintar yang mana masyarakat sudah merasakan manfaat adanya sebuah kebijakan.	Pebedaannya adalah menerangkan peran-peran dari suatu pemangku kepentingan dalam kebijakan yang telah dibuat dari sebuah instansi pemerintah dalam menjalankan sebuah kebijakan.
5	Muhammad Sultan, Totok Sasongko (2017)	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indoensia Pintar	Kebijakan mengurangi angka kemiskinan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui survey	Perbedaannya adalah tempat penelitian dan penerapan dan implementasi sebuah program atau kebijakan tanpa melihat pada sudut

		Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang).	serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah.	pandang peran pemangku kepentingan atau peran pemerintah khususnya sebagai pemegang peran dalam sebuah kebijakan.
--	--	--	---	---

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

2.5 KERANGKA BERPIKIR

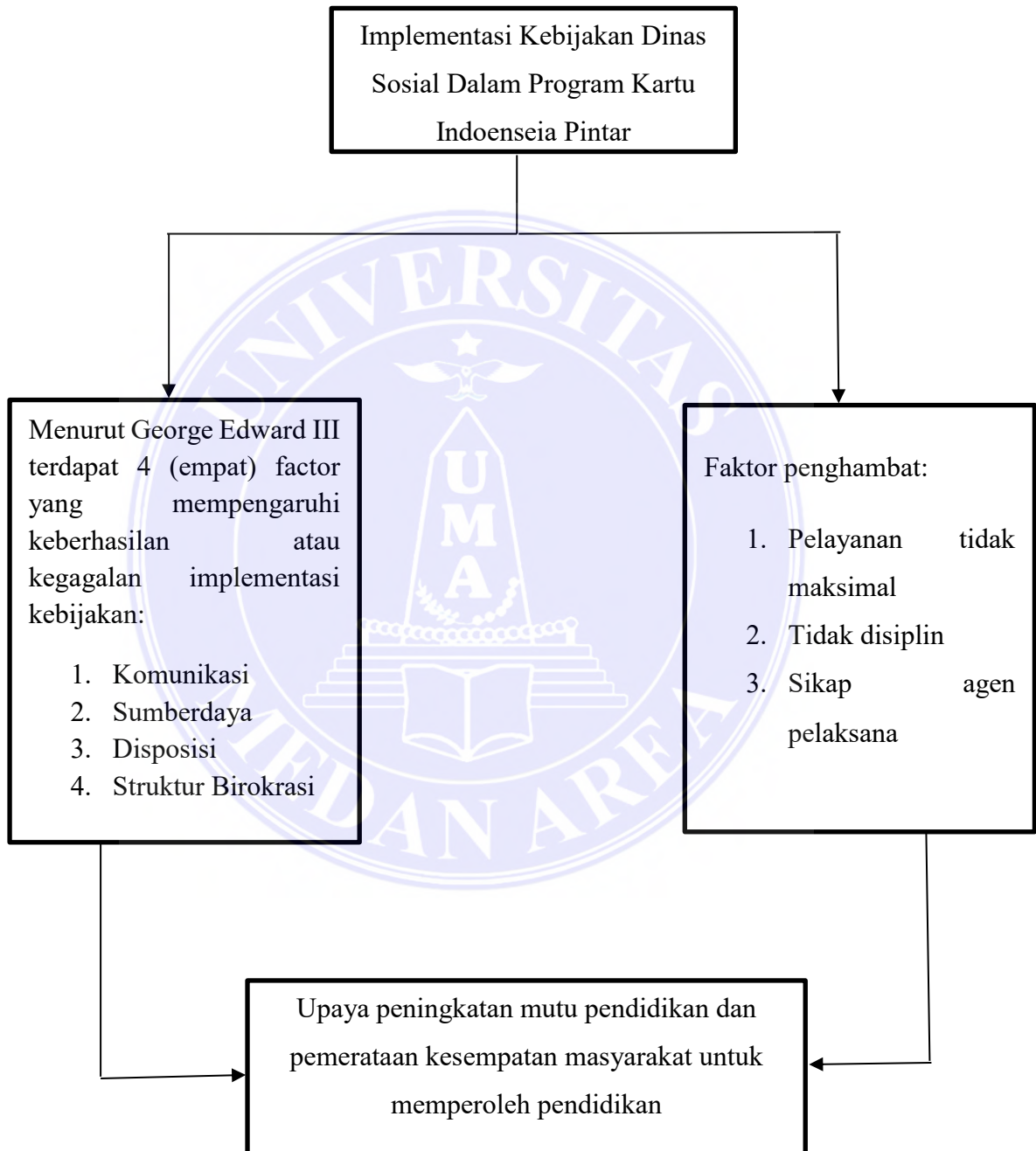
Kerangka berpikir merupakan garis pemikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dari awal, melalui proses pelaksanaan hingga akhir.

Kerangka berpikir juga dapat diartikan sebagai hubungan antar variabel yang disusun oleh teori yang diuraikan kemudian dianalisis lagi secara kritis dan sistematis untuk mensintesis hubungan antar variabel penelitian. Kerangka pemikiran alur pemikiran penulis sendiri atau bahkan suatu teori yang dianggap relevan atau terfokus untuk menanggapi permasalahan yang muncul dalam rumusan masalah penulis.

Penulis mengambil teori menurut George Edward (2011) dalam(Widodo (2011 :96-110) terdapat 4 (empat) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Adapun kerangka pemikiran penelitian yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut:



Bagan 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah, metode penelitian digunakan ketika melakukan penelitian pada saat penyusunan skripsi dan penelitian ilmiah lainnya.

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2014:5) penelitian adalah salah satu hal yang penting sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris dan sistemati) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

Selanjutnya Gay dalam Sugiyono (2015:9) menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan anatara penelitian murni dan terapan secara terpisah, karena keduanya terletak pada satu garis kontinum. Penelitian dasar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung secara praktis. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah praktis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:11) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

atau mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Menurut Strauss dan Corbin dalam V. Wiratna Sujarweni (2014:6) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Selanjutnya Menurut Sugiyono (2015:15) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Flick dalam Iman Gunawan (2013:81) adalah *specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds*. Artinya, penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dan berkaitan dengan hubungan sosial, hasil yang didapat dari jenis penelitian ini tidak dapat diperoleh dengan prosedur-prosedur statistik.

2. Tipe Penelitian

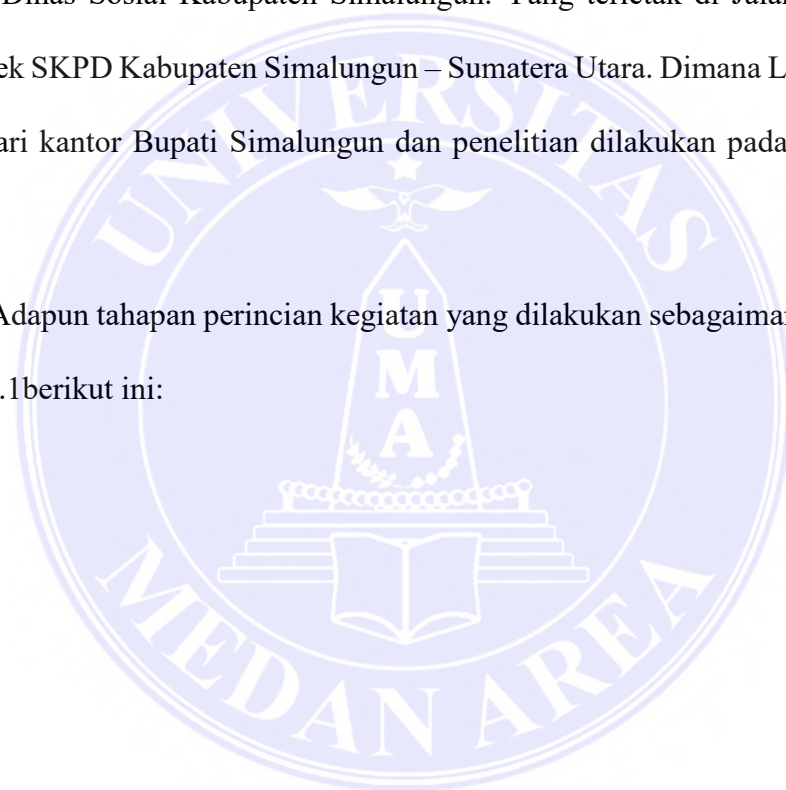
Menurut Sugiyono (2014: 13) metode deskriptif ialah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dan untuk memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, sumber data tertulis beserta foto sesuai permasalahan dalam penelitian ini.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di bidang Kartu Indonesia Pintar Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. Yang terletak di Jalan Sondi Raya, kompleks SKPD Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara. Dimana Lokasinya tidak jauh dari kantor Bupati Simalungun dan penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022.

Adapun tahapan perincian kegiatan yang dilakukan sebagaimana tertera pada tabel 3.1 berikut ini:



No	Kegiatan	Bulan ke :												
		Sep 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Jul 2022	Agst 2022	Sep 2022
1.	Penyusunan proposal													
2.	Seminar proposal													
3.	Perbaikan proposal													
4.	Pengambilan data/penelitian													
5.	Penyusunan skripsi													
6.	Seminar hasil													
7.	Perbaikan skripsi													
8.	Sidang meja hijau													

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016:139) informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara medalam. Dalam penelitian kualitatif, Menurut Afrizal (2016:139) informan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi Informan kunci penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun (Sakban Saragih, SP,M.Si).

b. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi Informan utamanya yaitu Kepala Bidang Fakir Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun (Andar Abdi Saragih, S.Pd, M.Si), dan Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Sosial (Ando Saragih, S.Sos).

c. Informan Tambahan

Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan penelitian ini adalah masyarakat

penerima Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Simalungun (ibu Sorlik purba, Rellianna saragih, Yosi, Yunidar gulo, dan Ayu purba).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Wawancara (interview)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:317) wawancara didefinisikan sebagai berikut. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sedangkan menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015:318) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya merupakan keterangan variabel dengan teknik peneliti hanya mengumpulkan data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan yang bersifat kalimat dan data dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pendataan untuk penerima Kartu Indonesia Pintar .

Menurut Sugiyono (2015:336) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Menurut Sugiyono (2015:336) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman.

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*) adalah tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah tahapan untuk merakum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- c. Penyajian Data (*Data Display*) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Simalungun mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Sosial tentang Program Kartu Indonesia Pintar Di Kabupaten Simalungun. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Tentang Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kabupaten Simalungun dengan menggunakan indikator dari George Edward III yang terdiri dari indikator: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur birokrasi.

Komunikasi yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial Simalungun mengenai Program Kartu Indonesia Pintar sudah cukup baik. Bahwa komunikasi di Dinas Sosial Simalungun sudah menyampaikan informasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap staff yang ada. Komunikasi menjadi salah satu hal yang sangat penting agar setiap pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat merupakan sosialisasi-sosialisasi tentang KIP itu sendiri.

Sumber daya sarana dan prasarana di Dinas Sosial simalungun masih kurang memadai dimana pelayanan untuk masyarakat sangat terbatas. Kurangnya fasilitas seperti komputer dan jaringan internet kurang mendukung dalam penginputan data masyarakat. keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Disposisi yang terjadi di Dinas Sosial simalungun sudah berjalan dengan baik dimana banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan kesediaan

pelaksanaan di kantor dinas sosial Simalungun dan pihak pelaksana membantu dan melayani masyarakat untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Masyarakat sebagai objek dan juga sebagai pelaksana program sangat antusias dan memahami arti pentingnya program yang sedang dijalankan.

Dalam struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah diberikan oleh kementerian pendidikan untuk mengatur tata cara dan pedoman untuk program kartu Indonesia Pintar karena tugas pokok dan fungsi ini dapat menimbulkan efektifitas dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan dapat terlaksana dengan baik bila adanya kerja sama semua pihak berperan seperti halnya dalam mengimplementasikan program kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Simalungun.

Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Dalam penanganan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kabupaten Simalungun yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana. Sehingga kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti jaringan dan alat teknologi seperti komputer sehingga dapat menghambat pelaksanaan dalam penginputan data KIP.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Selain Dinas Sosial tentu diperlukan instansi lainnya seperti Kelurahan dan Kecamatan, harus betul-betul melibatkan diri dalam menentukan kategori miskin bukan mengutamakan orang-orang terdekat seperti keluarga, lurah atau lain sebagainya karena dapat menghambat misi penuntasan program Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Simalungun.

2. Dinas sosial agar dapat menambah fasilitas yang kurang di kantor dinas social seperti komputer agar dapat melancarkan kepengurusan Kartu Indonesia Pintar atau mengurus data-data lain dan tidak memakai laptop pegawai itu sendiri. Dinas Sosial agar dapat penambahan jumlah pegawai yang dapat mengoperasikan pendataan masyarakat agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih efektif dan sesuai apa yang diharapkan masyarakat simalungun.



DAFTAR PUSTAKA

- Wahab Abdul, Solihin.2005. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.Jakarta:Bumi Aksara
- Wahab Abdul ,Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Abidin,Said Zainal. 2002. *Kebijakan publik*, jakarta:Yayasan Pancur Siwah.
- Muhammad Saroni. 2013 *Pendidikan Untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan Dalam Kesempatan Berpendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patillima, Hamid. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya
- Peter Salim. 1991. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press
- Rusdiana H.A. 2015.*Kebijakan pendidikan dari filosofi ke implementasi*, Bandung: pustaka setia.
- Rohman, Arif.2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta:Laksbang Mediatama
- Sedemayanti, Hidayat Syariffudin, 2002. *Metodologi Penelitian*, Bandung. Bandar Maju
- Sugiyono.2013.*Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta.
- Suryabrata Sumadi. 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Graffindo Persada
- Tilar, H.A.R dan Rian Nugroho.2006.*kebijakan pendidikan*, Yogyakarta: pustaka belajar.
- Winamo Budi. 2012, *Kebijakan Public (Teori dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: Buku Seru.
- Wahab, Abdul Solichin . 2008. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan)*. Cetakan keempat. Bumi Aksara:Jakarta.

Jurnal

- Ghafur Kharisma Ramadhan. (2014). *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di kecamatan sambas*. Jurnal. Universitas Tanjungpura
- Muhammad Sulhan, Totok Sasongko, (2017) *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat Di Kelurahan Kauman Kota Malang*.

Septiani Astuti, Rini, 2016. *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sri Esnawati. (2014). *Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP N Yogyakarta*

Triana Desita Sari, (2017). *Mengenai Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung*.

Perundang-undangan

Kebijakan berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 (2012)

Dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang pelaksanaan program perlindungan sosial

Pasal 34 UUD 1945 tentang jaminan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga produktif

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Kantor Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
(Senin, 24 Januari 2022)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan kunci yaitu Bapak Sakban Saragih, SP,M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun (senin 24 januari 2022 pukul 11:00 WIB)



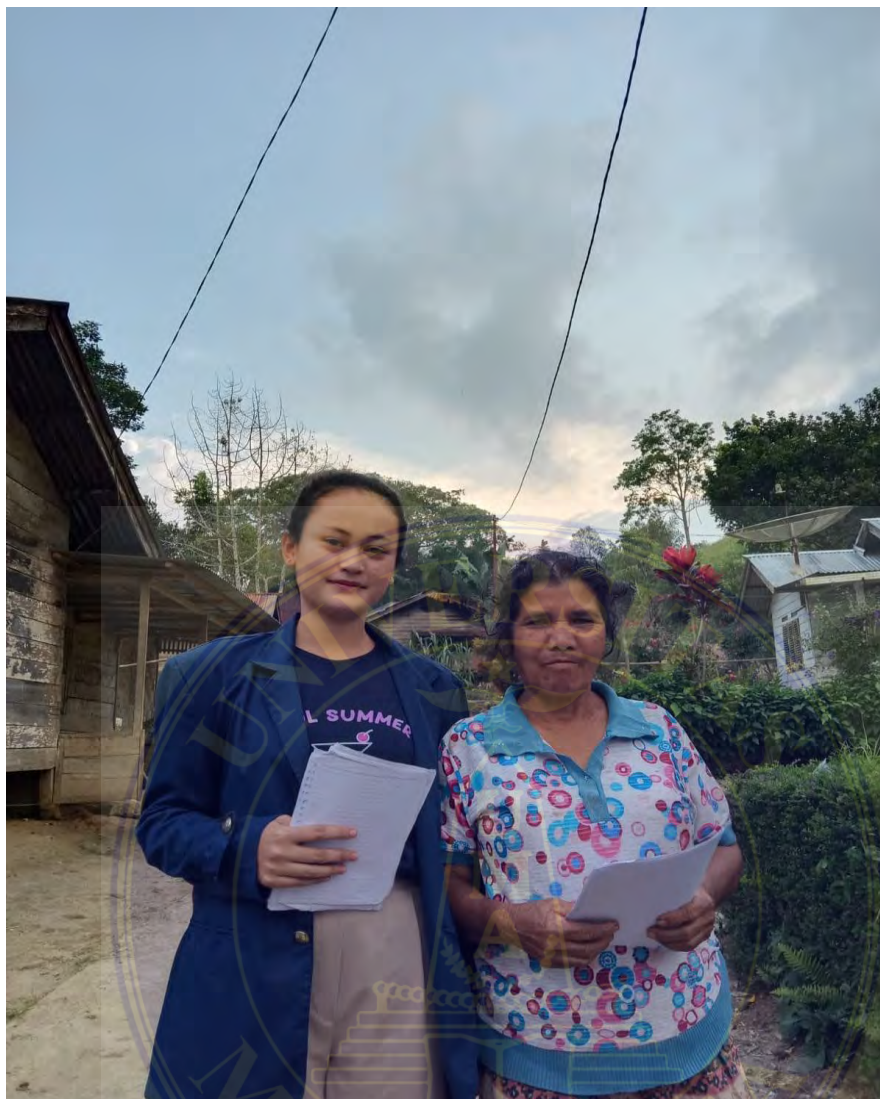
Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Andar Abdi Saragih, S.Pd. M.Si, selaku Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Simalungun. (senin, 24 januari Pukul 12:00 WIB).



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan utama yaitu Bapak Ando Saragih, S.Sos, selaku Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang Pemberdayaan Sosial Kabupaten Simalungun. (senin, 24 januari 2022 Pukul 14:30 WIB).



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibuk Rellianna Saragih sebagai masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Simalungun (selasa, 25 januari 2022 Pukul 11:00 WIB).



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibu Sorlik purba sebagai masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Simalungun. (selasa, 25 januari 2022 pukul 9:30 WIB)



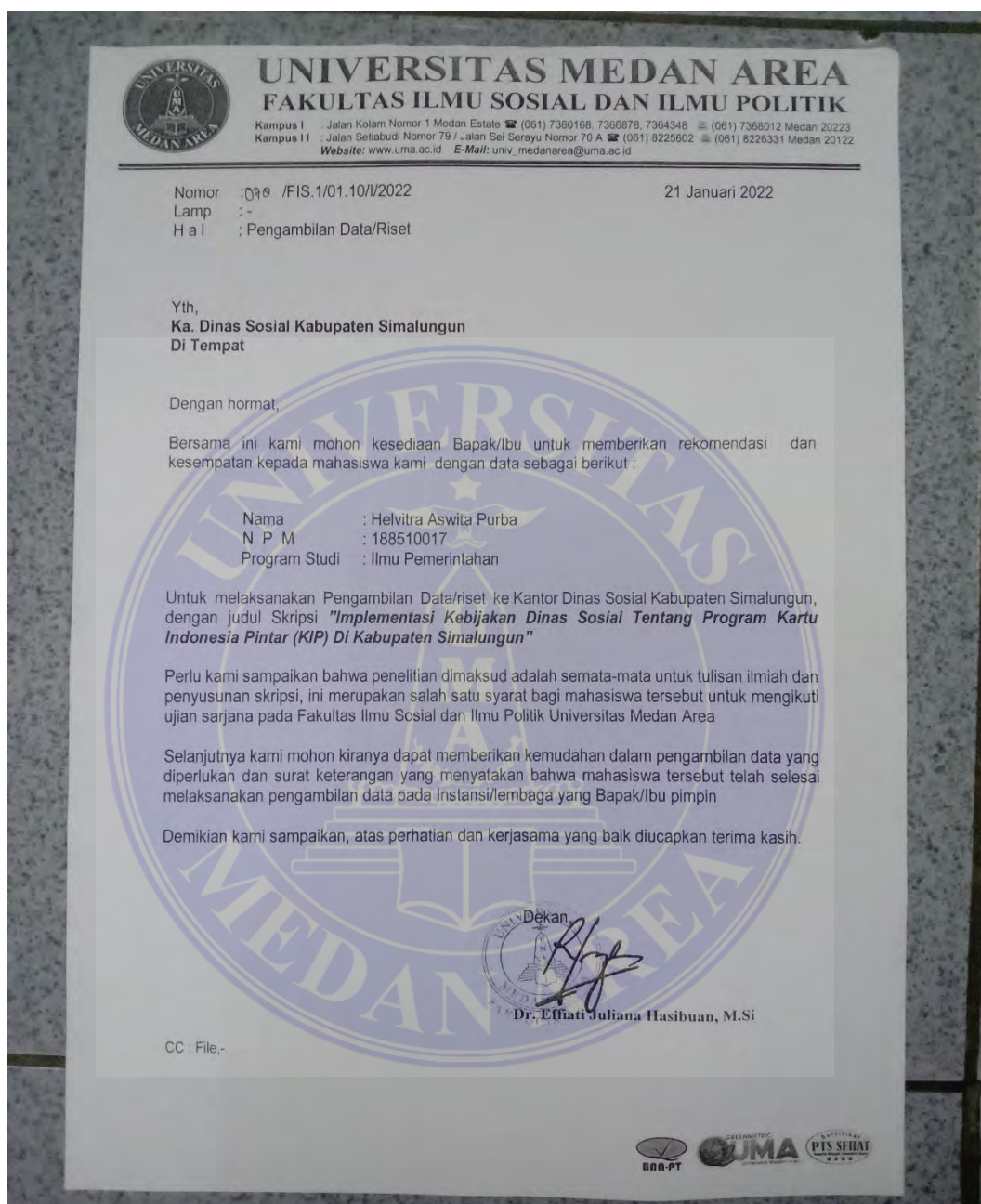
Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu ibu yunidar Gulo sebagai masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Simalungun. (sabtu,23 juli 2022 pukul 14:00 WIB)

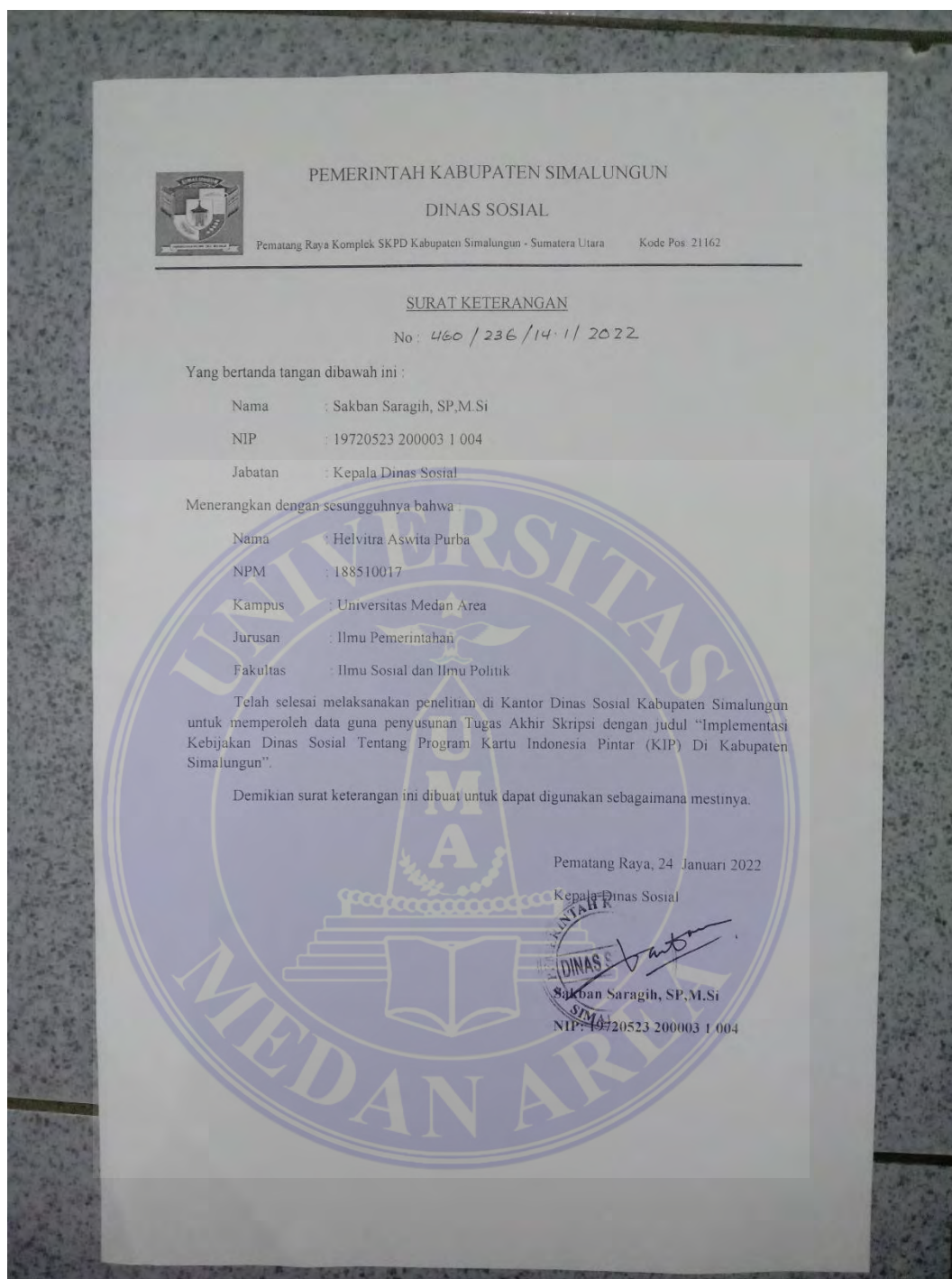


Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ibu yosi sebagai masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Simalungun.(sabtu, 23 juli 2022 pukul 15:30 WIB)



Dokumentasi peneliti setelah wawancara dengan informan tambahan yaitu Ayu purba sebagai masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar Kabupaten Simalungun.(sabtu, 23 juli 2022 pukul 13:00 WIB)





Lampiran 2 : Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Sakban Saragih, SP,M.Si

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 49 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun

2. Informan Utama

Nama : Andar Abdi Saragih, S.Pd, M.Si

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 35 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Fakir Miskin Kabupaten

3. Informan Tambahan

Nama : Ando Saragih, S.Sos

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 46 Tahun

Jabatan : Kepala seksi Penanganan Fakir Miskin di Bidang
Pemberdayaan Sosial Kabupaten Simalungun.

4. Informan Tambahan

Nama : Rellianna Saragih

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 58 Tahun

Pekerjaan : Petani

5. Informan Tambahan

Nama : Sorlik purba

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 60 Tahun

Pekerjaan : Petani

6. Informan Tambahan

Nama : Yunidar gulo

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani

7. Informan Tambahan

Nama : Yosi

Usia : 41 Tahun

Jenis kelamin : perempuan

Pekerjaan : petani

8. Informan Tambahan

Nama :Ayu purba

Usia :17 Tahun

Jenis kelamin : perempuan



Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk informan kunci yaitu Kepala Dinas Sosial.

1. Apa saja hambatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan kebijakan program Kartu Indonesia Pintar ?
2. Kebijakan seperti apakah yang dilakukan dinas sosial dalam penanganan program Kartu Indonesia pintar ?
3. Bagaimana pemahaman dan tanggapan masyarakat mengenai program ini?
4. Fasilitas apa saja yang menjadi penghambat dalam program Kartu Indonesia Pintar ini ?
5. Apakah masyarakat yang sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah tentu mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ?

Daftar pertanyaan untuk informan utama yaitu Kepala Bidang Fakir Miskin dan Kepala Seksi penanganan fakir miskin dibidang pemberdayaan sosial.

1. Apakah bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar sudah tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap masyarakat yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ?
3. Apakah penanganan program Kartu Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik atau sudah efektif ?
4. Apa aja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar ?

5. Dari segi penilaian, Apakah masyarakat yang kurang mampu yang datang ke Dinas Sosial ini sudah pasti mendapat Kartu Indonesia pintar ?

Daftar pertanyaan untuk informan tambahan yaitu masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Simalungun.

1. Bagaimana pelayanan staff pegawai atau pelaksana dalam penanganan Kartu Indonesia Pintar ?
2. Hambatan apa saja yang anda alami dalam kepengurusan Kartu Indonesia Pintar ?
3. Apa aja yang menjadi keluhan masyarakat dalam kepengurusan Kartu Indonesia Pintar ?
4. Apakah dengan adanya Bantuan program Kartu Indonesia Pintar ini sudah sangat membantu dalam kebutuhan anak untuk sekolah ?